



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. MUARA ENIM



Sinergi untuk Indonesia Maju

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

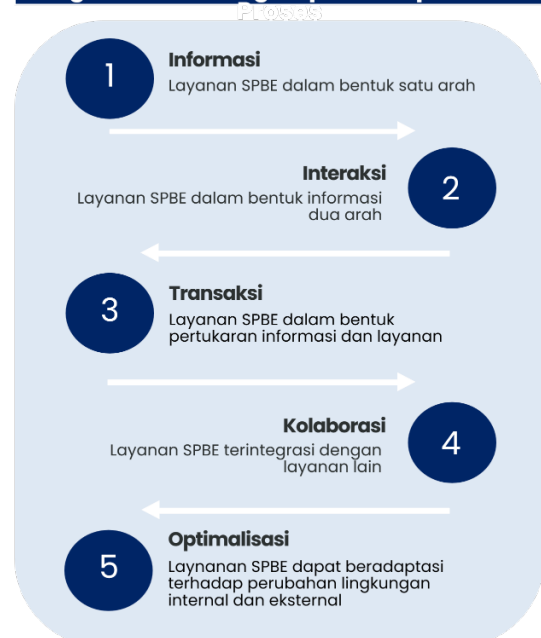
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



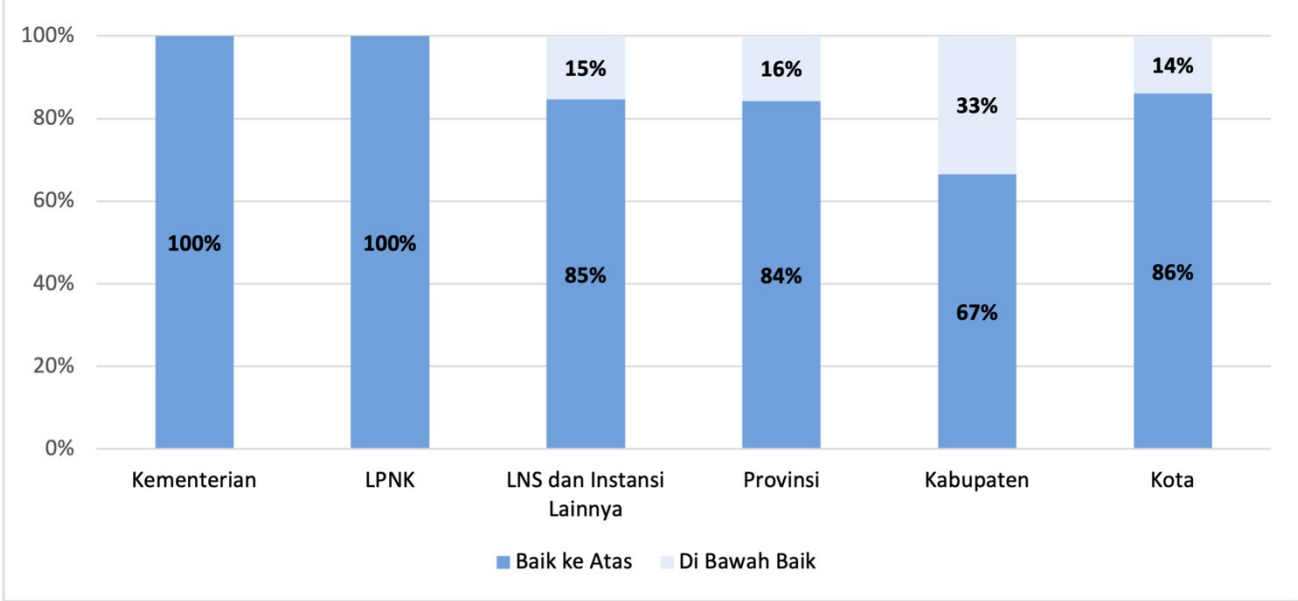
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> *) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5	Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																			

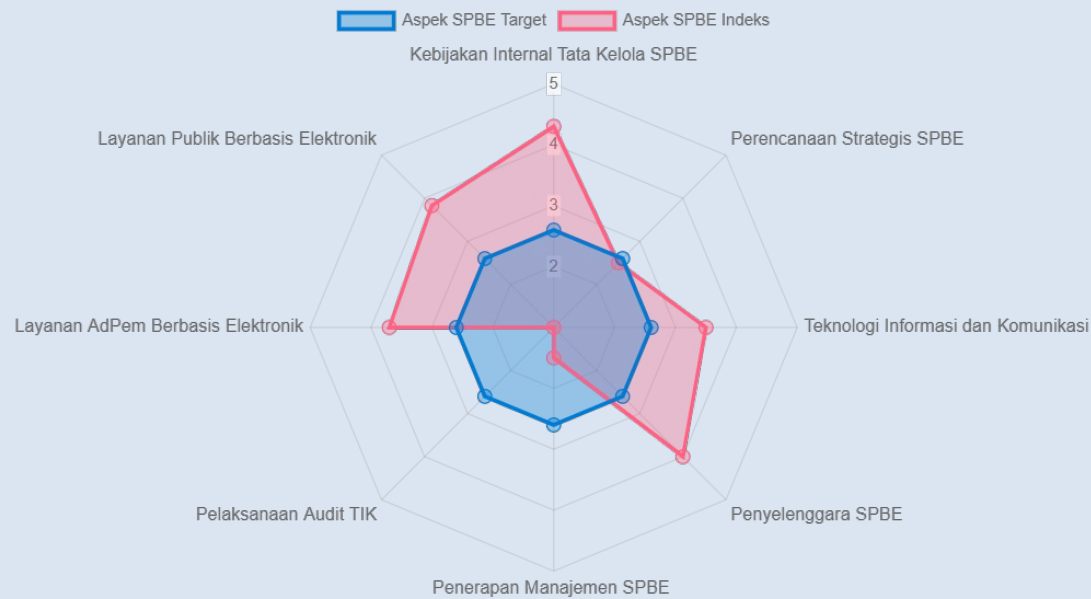
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,29
Domain Kebijakan SPBE	4,30
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	4,30
Domain Tata Kelola SPBE	3,20
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	2,50
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	3,50
<i>Penyelenggara SPBE</i>	4,00
Domain Manajemen SPBE	1,36
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,50
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	3,75
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,70
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	3,83

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Skor pemenuhan pada aspek ini adalah 4,3. Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sebagian besar telah terpenuhi dengan baik. Indikator 1, 3, 5, dan 10 telah mencapai level 5. Indikator 2, 4, 6, 7, 8 telah mencapai level 4. Hanya indikator 9 terkait audit TIK yang mencapai level 3 karena belum pernah dilakukan revidu.

- **Kekuatan**
Pengelolaan SPBE diatur pada Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan SPBE. Hampir semua indikator (kecuali indikator 9) telah dilakukan proses revidu terhadap kebijakan internal tata kelola SPBE. Beberapa peraturan turunan telah dibuat sebagai tindak lanjut hasil revidu. Namun demikian, catatan/notulensi revidu tidak menyatakan secara detail komponen SPBE yang direvidu, permasalahan, dampak, dan rencana perbaikannya. Sehingga, sulit dilihat keselarasan antara hasil revidu dengan upaya tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan. Indikator 9 terkait audit TIK masih mencapai level 3 karena belum pernah dilakukan revidu.
- **Kelemahan**
Tidak ada kelemahan untuk aspek ini. Semua indikator telah mencapai level 3, 4, dan 5.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Skor pemenuhan pada aspek ini adalah 2,5. Aspek perencanaan strategis SPBE belum terpenuhi dengan baik. Hanya indikator 11 tentang Arsitektur SPBE yang telah mencapai level 4. Indikator 12, 13, 14 masih mencapai level 2. Pemkab telah memiliki arsitektur SPBE as-is yang telah diinput di SIA dan telah direvidu. Namun belum disusun arsitektur to-be, peta rencana SPBE, dan proses bisnis to-be. Rencananya, arsitektur to-be dan peta rencana akan siap pada akhir tahun 2024.

- **Kekuatan**
Indikator 11 tentang Arsitektur SPBE yang telah mencapai level 4. Pemkab telah memiliki arsitektur SPBE as-is yang telah diinput di SIA. Telah dilakukan revidu terhadap arsitektur as-is. Telah terdapat rencana dan anggaran untuk pengelolaan SPBE pada RKPD 2023 dan 2024.
- **Kelemahan**
Indikator 12, 13, 14 masih mencapai level 2. Peta rencana SPBE dan proses bisnis to-be belum selesai disusun. Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE belum dapat dilihat karena belum adanya peta rencana.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Skor pemenuhan pada aspek ini adalah 3,5. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi telah terpenuhi sesuai standar. Indikator 17 terkait layanan jaringan intra mencapai level 5. Layanan ini telah dimanfaatkan oleh semua OPD, juga telah direvidu dan dilakukan tindak lanjut perbaikan. Sedangkan indikator 15, 16, dan 18 mencapai level 3.

- **Kekuatan**
Indikator 17 terkait layanan jaringan intra telah dimanfaatkan oleh semua OPD, juga telah direvidu dan dilakukan tindak lanjut perbaikan. Sedangkan indikator 15, 16, dan 18 mencapai level 3. Belum dilakukan revidu terhadap proses pengembangan aplikasi, pemanfaatan pusat data, dan sistem penghubung layanan.
- **Kelemahan**
Tidak ada kelemahan untuk aspek ini. Semua indikator telah mencapai level 3 dan 5.

D. Penyelenggara SPBE

Skor pemenuhan pada aspek ini adalah 4. Aspek Penyelenggara SPBE telah terpenuhi dengan baik. Indikator 19 tentang Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE telah mencapai level 5. Pemkab telah membentuk Tim Koordinasi SPBE, dan telah melakukan revidu terhadap kinerjanya. Hasil revidu telah digunakan untuk menyusun Tim Koordinasi SPBE yang baru. Sedangkan indikator 20 terkait kolaborasi penerapan SPBE, mencapai level 3. Belum pernah dilakukan revidu terhadap efektifitas kolaborasinya.

- **Kekuatan**
Indikator 19 tentang Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE telah mencapai level 5. Pemkab telah membentuk Tim Koordinasi SPBE, dan telah melakukan revidu terhadap kinerjanya. Hasil revidu telah digunakan untuk menyusun Tim Koordinasi SPBE yang baru. Sedangkan indikator 20 terkait kolaborasi penerapan SPBE, mencapai level 3. Belum dilakukan revidu terkait efektifitas kolaborasi penerapan SPBE dengan mitra-mitra yang ada.
- **Kelemahan**
Tidak ada kelemahan untuk aspek ini. Semua indikator telah mencapai level 3 dan 5.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Skor pemenuhan pada aspek ini adalah 1,5. Aspek Penerapan Manajemen SPBE belum terpenuhi dengan baik. Indikator 22, 23, 25, dan 26 masih mencapai level 2. Sedangkan indikator 21, 24, 27, dan 28 masih mencapai level 1. Hal ini dikarenakan Pemkab belum memiliki peta rencana SPBE yang menjadi acuan dalam pelaksanaan manajemen SPBE.

- **Kekuatan**
Semua indikator masih berada di level 1 dan 2. Namun demikian, Pemkab telah berupaya membentuk tim untuk mengelola keamanan informasi dan manajemen pengetahuan, menyusun peraturan tentang manajemen data, dan melakukan pengembangan SDM untuk memenuhi 6 kompetensi SPBE.
- **Kelemahan**
Indikator 22, 23, 25, dan 26 masih mencapai level 2. Sedangkan indikator 21, 24, 27, dan 28 masih mencapai level 1. Hal ini dikarenakan Pemkab belum memiliki peta rencana yang menjadi acuan dalam penerapan manajemen SPBE.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Skor pemenuhan pada aspek ini adalah 1. Aspek Pelaksanaan Audit TIK belum terpenuhi. Indikator 29, 30, 31 masih di level 1. Belum dilakukan upaya untuk audit TIK karena Pemkab masih berfokus untuk menata aspek tata kelola dan manajemen SPBE, seperti menyusun arsitektur to-be, peta rencana, dan proses bisnis to-be.

- **Kekuatan**
Belum ada unsur kekuatan pada aspek Pelaksanaan Audit TIK
- **Kelemahan**
Indikator 29, 30, 31 masih di level 1. Belum ada perhatian untuk melakukan audit TIK karena Pemkab masih berfokus untuk menata aspek tata kelola dan manajemen SPBE.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Skor pemenuhan pada aspek ini adalah 3,7. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik telah terpenuhi dengan baik. Indikator 32 sampai 38 telah mencapai level 4. Sedangkan indikator 39 sampai 41 mencapai level 3. Pemkab telah memanfaatkan sebagian besar aplikasi umum dan aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan oleh pemerintah pusat.

- **Kekuatan**
Indikator 32 sampai 38 telah mencapai level 4. Sedangkan indikator 39 sampai 41 mencapai level 3. Pemkab telah memanfaatkan sebagian besar aplikasi umum dan aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan oleh pemerintah pusat seperti SIPD, SPSE, E-BMD, SRIKANDI, E-Sakip, dan E-Kinerja. Untuk meningkatkan pencapaian levelnya, Pemkab perlu melakukan reviu dan upaya perbaikan terkait layanan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- **Kelemahan**
Tidak ada kelemahan untuk aspek ini. Semua indikator telah mencapai level 3 dan 4.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Skor pemenuhan pada aspek ini adalah 3,83. Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik telah terpenuhi dengan baik. Hampir semua indikator telah mencapai level 4. Hanya indikator 43 tentang Layanan Data Terbuka yang mencapai level 3.

- **Kekuatan**
Hampir semua indikator telah mencapai level 4. Hanya indikator 43 tentang Layanan Data Terbuka yang mencapai level 3. Aplikasi berbagai pakai yang digunakan adalah LAPOR-SP4N, OSS, dan JDIH. Pemkab juga mengembangkan aplikasi sendiri untuk layanan publik sektoral yang telah memiliki kapabilitas level 3 dan 4, seperti Aplikasi mobile dan website Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB, dan layanan PBB Online SISMIOP SIPPELE yang telah terintegrasi dengan layanan SICERDAS. Untuk meningkatkan tingkat kematangannya, Pemkab perlu melakukan reviu dan upaya perbaikan terhadap layanan publik sektoral yang telah dijalankan.
- **Kelemahan**
Tidak ada kelemahan untuk aspek ini. Semua indikator telah mencapai level 3 dan 4.

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemkab Muara Enim. Pimpinan pemkab memiliki komitmen yang sangat baik dalam pengelolaan SPBE. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan, sudah dapat menggambarkan predikat baik dalam penerapan SPBE, dengan nilai indeks total 3,29, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan:

Pembkab Muara Enim memiliki keunggulan pada aspek pengelolaan SPBE (rata-rata skor di atas 3,5) sebagai berikut. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE=4,3 Penyelenggara SPBE=4 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik=3,7 dan Layanan Publik Berbasis Elektronik=3,833. Sedangkan aspek dengan pencapaian standar yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi=3,5.

Pembkab telah memiliki kebijakan internal tata kelola SPBE. Kebijakan tersebut telah direviu dan disusun beberapa kebijakan turunan. Pemkab telah memiliki arsitektur SPBE as-is yang telah diinput di SIA dan telah dilakukan reviu terhadap arsitektur as-is. Layanan jaringan intra, pusat data, dan sistem penghubung layanan telah dimanfaatkan oleh semua OPD. Pemkab telah membentuk Tim Koordinasi SPBE, dan telah melakukan reviu terhadap kinerjanya. Pemkab telah melaksanakan kolaborasi penerapan SPBE dengan mitra-mitranya. Pemkab telah memanfaatkan sebagian besar aplikasi umum dan aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan oleh pemerintah pusat seperti SIPD, SPSE, E-BMD, SRIKANDI, LAPORSP4N, OSS, E-Sakip, dan E-Kinerja. Pemkab juga mengembangkan aplikasi sendiri untuk layanan publik sektoral seperti Aplikasi mobile dan website Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB, dan layanan PBB Online SISMIOP SIPPELE yang telah terintegrasi dengan layanan SICERDAS.

Kelemahan:

Pembkab Muara Enim memiliki kelemahan pada aspek pengelolaan SPBE (rata-rata skor di bawah 2,6) yaitu Perencanaan Strategis SPBE=2,5 Penerapan Manajemen SPBE=1,5 dan Pelaksanaan Audit TIK=1.

Peta rencana SPBE dan proses bisnis to-be belum selesai disusun. Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE belum dapat dilihat karena belum adanya peta rencana. Manajemen SPBE belum dapat diterapkan karena belum adanya peta rencana yang diperlukan sebagai acuan untuk pelaksanaannya. Belum ada perhatian untuk melakukan audit TIK karena Pemkab masih berfokus untuk menata aspek tata kelola dan manajemen SPBE.

Rekomendasi:

1. Perlu segera diselesaikan penyusunan arsitektur to-be dan peta rencana SPBE. Hal ini diperlukan untuk dapat meningkatkan capaian level indikator-indikator pada aspek tata kelola dan manajemen. Selanjutnya dapat disusun aturan-aturan terkait pelaksanaan manajemen SPBE.

2. Untuk mempertahankan capaian pada aspek kebijakan internal SPBE, perlu diperhatikan detail catatan/notulensi pada proses reviu kebijakan. Notulensi reviu seharusnya menyatakan secara detail komponen SPBE yang direviu, analisis permasalahan dan dampak, serta rencana perbaikan. Rencana perbaikan ini nantinya harus selaras dengan upaya tindak lanjut untuk perbaikan.

3. Perlu disusun tim audit internal untuk memulai melakukan proses audit terhadap TIK yang telah digunakan.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	4
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	4
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	4
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	5
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	5
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sinergi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024